



KETERCAPAIAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI MASA PANDEMI COVID-19

Roberto W. Marpaung^{1*}, Serlina Boru Sinaga²

^{1,2} Universitas Musamus

* Corresponding Author: roberto_fkip@unmus.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 20/01/2022

Direvisi : 30/01/2022

Disetujui:05/02/2022

Keywords:

Curriculum 2013,
Citizenship Education
Curriculum, Covid-19

Kata Kunci:

Kurikulum 2013,
Kurikulum Pendidikan
Kewarganegaraan, Covid-
19.

Abstract. *The issue of decreasing knowledge of nationalism of the senior high students in Papua had been the background of this research. The Covid-19 Pandemic has impacted various sectors, especially in education. More research are needed to figure out the education implementation during the pandemic so that appropriate policies can then be formulated and issued. This research was aimed at describing the implementation of 2013 Curriculum during the pandemic on Civics. It was carried out at SMA Negeri 2 Merauke. The research design applied was a descriptive with qualitative method. Three data collection techniques were used; interviews, observations, and documentation. The respondents of research consisted of principal, vice principal for curriculum, Civics teacher, and school administration officer. The data analysis was carried out by following several stages, such as data presentation, data reduction, and conclusion. The result showed that the implementation of Curriculum 2013 on Civics during the Pandemic Covid-19 was not effective. It was also not suitable with the emergency condition as Covid-19. Long distance learning model was difficult for teachers to develop the students' knowledge and behavior of defending the nation of Republik Indonesia. Several technical issues were found by both teachers and students in implementing long distance learning (online learning). Some discrepancies were also found in the learning approach, learning model, learning method and learning media. Therefore, curriculum development with special conditions (not 2013 Curriculum) is needed during the condition of emergency, for example during the Covid-19 Pandemic.*

Abstrak. Penelitian ini berangkat dari isu meningkatnya degradasi wawasan kebangsaan lulusan Sekolah Menengah Atas khususnya di wilayah perbatasan negara.. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif di berbagai sektor khususnya di sektor pendidikan. Dibutuhkan riset untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan pendidikan selama pandemi sehingga kemudian bisa diambil kebijakan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang implementasi dan tingkat ketercapaian implementasi Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 pada Mata Pelajaran PKn. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 2 Merauke. Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian dekriptif dengan metode kualitatif. Sejumlah teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Responden penelitian terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, guru PKn, dan tata usaha. Analisis data dilakukan dengan tahapan penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum 2013 di masa pandemi pada Mata Pelajaran PKn kurang berhasil dan tidak cocok dengan kondisi khusus pada masa Pandemi Covid-19. Model pembelajaran jarak jauh menjadi kendala bagi guru untuk mengembangkan pengetahuan dan sikap bela negara peserta didik selama pandemi. Selain itu, beberapa kendala teknis dialami guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring (jarak jauh). Beberapa ketidaksesuaian juga ditemukan pada pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan. Dengan demikian, pengembangan kurikulum dengan kondisi khusus (bukan Kurikulum 2013) dibutuhkan pada masa-masa darurat misalnya masa Pandemi Covid-19.

How to Cite: Marpaung, R.W., & Sinaga, S. B. (2022). KETERCAPAIAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 DI MASA PANDEMI COVID-19. *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(2), 170-179. <https://doi.org/10.37478/jpm.v3i2.1521>

Alamat korespondensi:

Jl. Nowari, Karang Indah Merauke, Provinsi Papua.

roberto_fkip@unmus.ac.id

Penerbit:

Program Studi PGSD Universitas Flores.

primagistrauniflor@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia terbentuk oleh keberagaman, dipersatukan oleh ideologi Pancasila. Sila ke-3 Pancasila merajut dan mempersatukan setiap perbedaan suku, ras, agama, budaya yang ada di seluruh nusantara. Pancasila, dengan seluruh nilai yang melekat di dalamnya, merupakan harta warisan dari para pendiri bangsa yang mesti ditumbuhkembangkan pada setiap generasi. Pewarisan nilai-nilai tersebut tentu saja dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan pendidikan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Instansi pendidikan harus mampu menjamin bahwa setiap anak bangsa mengetahui dan mampu mewujudkan nilai-nilai Pancasila ketika menjadi masyarakat atau warga negara. Hal ini mesti dilakukan agar anak bangsa memiliki rasa persatuan dan cinta tanah air yang menjadi kekuatan untuk memajukan bangsa dan mampu bersaing dengan SDM dari negara-negara lain.

Kualitas sumber daya manusia sangat bergantung pada dan berbanding lurus dengan mutu pendidikan (Fitrah, 2017; Ekawati, 2018; Tahir, 2017). Salah satu faktor penentu kualitas SDM adalah karakter. Menurut Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, beberapa nilai utama karakter yang perlu ditumbuhkembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah semangat kebangsaan, toleransi, dan cinta tanah air (Kemendikbud, 2020).

Berkaitan dengan hal itu, pemerintah juga meluncurkan Profil Pelajar Pancasila dimana setiap pelajar harus; 1) beriman, bertakwa kepada TUE, dan berakhlak mulia; 2) berkebinekaan global; 3) mampu bergotong royong; 4) mandiri; 5) bernalar kritis; dan 6) kreatif. Rancangan tertulis untuk dapat menumbuhkembangkan karakter dan mewujudkan Pelajar Pancasila perlu dibuat dengan memperhatikan tujuan pendidikan nasional. Konten atau isi kurikulum Mata Pelajaran PKn menjadi penting karena akan

menentukan tumbuhkembangnya karakter peserta didik sebelum terjun menjadi masyarakat. Karakter peserta didik terbentuk melalui pembelajaran Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Selanjutnya, pendidikan menengah menjadi pusat perhatian banyak pihak karena pada jenjang inilah peserta didik diarahkan, dibina dan ditempa sebelum terjun menjadi masyarakat setelah lulus. Pada jenjang ini, peserta didik mengalami masa peralihan dari remaja menuju dewasa. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan menengah harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya. Penyelenggaraan pendidikan menengah ini juga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan berbagai pihak termasuk semua elemen masyarakat.

Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa yang harus ditanamkan kepada seluruh peserta didik secara berkelanjutan. Pendidikan Kewarganegaraan termasuk salah satu muatan wajib kurikulum (Kemendikbud, 2021). Namun, walaupun diwajibkan dalam muatan kurikulum, masih terdapat lulusan pendidikan menengah yang belum memahami dan belum mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat (Erinawati, 2022; Wiratomo et al., 2022; Lithfiah, 2022). Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sulit dipahami oleh peserta didik sehingga banyak diantara mereka yang tidak tuntas (Saputra & Nuriyadi, 2016). Padahal, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila berperan untuk menciptakan kemaslahatan bangsa dan negara dengan memandang NKRI sebagai bingkai kebersamaan (Laksono 2019).

Maraknya paham-paham radikalisme dan separatisme menjadi salah satu tantangan pada pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan seharusnya bisa menjamin pewarisan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda khususnya peserta didik yang menempuh pendidikan menengah. Melalui pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, dengan kandungan nilai-nilai konsensus dan kontrak sosial, serta social



imaginary, semua warga negara membayangkan kemaslahatan bangsa dan negara dengan memandang tanah air Indonesia sebagai kerangka bersama demi pencapaian *common good*.

Beberapa tahun terakhir ini, terjadi degradasi pengetahuan lulusan SMA tentang Pancasila serta pengamalan nilai-nilainya. Fakta tersebut didukung oleh penelitian awal (*preliminary research*) yang dilakukan oleh peneliti terhadap peserta didik (mahasiswa) yang menempuh semester satu dan dua di salah satu perguruan tinggi negeri di Papua. Saat diberikan pertanyaan tentang Pancasila, lebih dari 50 % mahasiswa tidak menghafal kelima sila Pancasila tersebut. Hal ini tentu saja menjadi sebuah masalah besar bagi pendidikan nasional khususnya pendidikan di daerah Papua mengingat eksistensi dari paham-paham separatisme yang ada dan terus berkembang di Provinsi Papua sebagai daerah perbatasan di ujung timur Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melalui seluruh instansi pendidikan harus bekerja sama dengan masyarakat, bergerak cepat mengejar ketertinggalan pendidikan di Papua sebagai benteng yang kokoh untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik harus dibekali dengan pondasi yang kuat untuk menangkis paham-paham radikalisme dan separatisme dengan pengetahuan tentang Pancasila serta kemampuan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut.

Salah satu komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional adalah untuk menciptakan pelajar pancasila yaitu pelajar yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Provinsi Papua secara geografis merupakan wajah dan pintu gerbang Negara Indonesia di sebelah timur yang merupakan daerah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Letak geografis tersebut menjadikan daerah Papua rawan akan paham dan ideologi separatisme yaitu upaya untuk melakukan disintegrasi atau perpecahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika masyarakat belum memahami dan belum mampu menghayati dan mengamalkan sistem nilai dalam Pancasila, maka mereka rentan

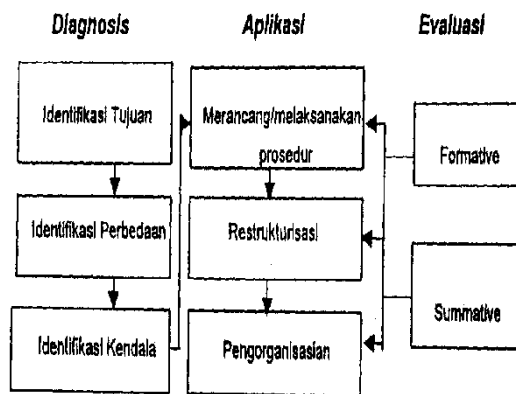
terpapar ideologi-ideologi dan paham radikalisme maupun separatisme. Jadi, generasi muda wajib dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan mengamalkan sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kurikulum merupakan dokumen tertulis yang menjadi salah satu unsur dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum harus dikembangkan berlandaskan budaya bangsa, kehidupan sekarang dan masa yang akan datang (Kemendikbud, 2012). Perlu dilakukan kajian-kajian kurikulum yang diterapkan di satuan-satuan pendidikan. Kurikulum, sebagai bagian dari sistem pendidikan, memainkan peranan yang krusial dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum mesti dikembangkan dengan sebaik mungkin dan harus melibatkan semua pihak demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Jadi, jelas bahwa penelitian terkait kurikulum harus ditingkatkan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Hasil penelitian tentang kurikulum akan menjadi dasar pijakan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan-kebijakan strategis khususnya kebijakan di bidang pendidikan. Hasil penelitian terkait kurikulum juga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan kurikulum khususnya di wilayah Papua.

Kurikulum menjadi pedoman tertulis penyelenggaraan pendidikan di suatu wilayah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Depdiknas, 2003). Implementasi berarti pewujudan rencana menjadi pelaksanaan atau aksi konkret. Kemudian menurut Wahyudin (2014), implementasi diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis (*written curriculum*) dalam bentuk pembelajaran. Maka, implementasi kurikulum memiliki arti realisasi rancangan kurikulum ke dalam pembelajaran. Berkaitan dengan itu, (Miller & Seller, 1985) mengemukakan tujuh komponen utama perencanaan implementasi kurikulum, antara lain; mengkaji program baru, identifikasi sumber-sumber, menetapkan peran, pengembangan profesional, penjadwalan,



membangun sistem komunikasi, dan pemantauan pelaksanaan. Selanjutnya, mereka mengemukakan tiga model implementasi kurikulum yang bisa mengakomodasi permasalahan yang ada di lapangan (Miller & Seller, 1985). Model-model tersebut antara lain; *Concern-Based Adoption Model* (CBAM), *The Innovation Profile Model*, dan TORI (*Trust, Openness, Realization, and Independency*) Model (Salabi, 2020). Dari model-model di atas, model *Innovation Profile* sangat fleksible untuk menginternalisasi pemikiran inovatif dalam kurikulum (Salabi, 2020). Untuk lebih jelas lagi, implementasi model ini dapat dilihat pada gambar.



Gambar 1. Strategi Implementasi Kurikulum. Sumber: Miller dan Seller (1985).

Melalui gambar di atas, dapat dipahami bagaimana proses penerapan model *Innovation Profile*. Terdapat enam tahapan dengan tiga fase, yaitu fase diagnosis yang terdiri dari identifikasi tujuan, identifikasi perbedaan, dan identifikasi kendala. Fase aplikasi terdiri dari tahapan merancang/melaksanakan prosedur, melakukan restrukturisasi, dan tahap pengorganisasian. Kemudian pada fase evaluasi dibagi menjadi dua jenis; evaluasi formatif dan sumatif.

Jadi, implementasi kurikulum merupakan upaya untuk mewujudkan rencana menjadi aksi atau tindakan. Implementasi kurikulum dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik melalui kementerian ataupun lembaga non kementerian lainnya. Kesalahan penerapan atau pelaksanaan kurikulum

berdampak fatal bagi pencapaian keberhasilan pendidikan. Jadi, implementasi kurikulum harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten demi tercapainya tujuan pendidikan yang dirumuskan. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang mulai diberlakukan pemerintah pada tahun 2013. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi menjadi bagian dari usaha pemerintah untuk mencetak masyarakat unggul untuk menguasai ilmu dan teknologi seperti tercantum dalam garis-garis haluan Negara (Mulyasa 2003). Pengembangan kurikulum dalam hal ini mengacu pada pencapaian kompetensi yang ada dalam standar kompetensi lulusan (SKL). Indikator keberhasilan kurikulum dapat dilihat dari ketercapaian kompetensi oleh seluruh peserta didik yang ada dalam rancangan dokumen kurikulum awal. Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi antara lain; kompetensi afektif spiritual, afektif sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Pemberlakuan kurikulum 2013 telah memacu semangat semua pihak yang terlibat untuk menelenggarakan pendidikan berdasarkan kompetensi lulusan bukan isi. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) termasuk dalam muatan wajib Kurikulum 2013. Walaupun menjadi muatan wajib, mata pelajaran ini sering dianggap tidak relevan karena dasar teori yang masih kurang. Sebagaimana dinyatakan oleh Rowe (2000), PKn pada akhirnya menjadi muatan pilihan, terfragmentasi, sumber belajarnya sedikit, dasar teorinya lemah, dan diajar oleh guru-guru yang tidak terampil dan kompeten. Padahal, nilai-nilai Pancasila ditumbuhkembangkan melalui Mata Pelajaran PKn. Sejak pemerintah menyerukan pendidikan karakter, muatan PKn di dalam kurikulum menjadi isu hangat dan banyak diperbincangkan oleh praktisi pendidikan. Kedudukannya menjadi sangat penting ketika pemerintah melalui kementerian terkait meluncurkan profil pelajar Pancasila.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 (Depdiknas, 2003) dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menempa peserta didik menjadi pribadi yang cinta tanah air dan berkebangsaan. Amanat yang

terkandung dalam penjelasan tersebut sangat sederhana dari segi semantikal, yaitu menciptakan SDM yang berkebangsaan dan memiliki rasa cinta tanah air. Akan tetapi, jika ditelisik lebih dalam lagi, amanat tersebut memiliki makna dan arti yang begitu besar terhadap keutuhan negara. Indonesia dengan masyarakat yang majemuk sangat rentan dengan konflik sosial terkait isu-isu SARA. Solusi untuk mengantisipasi konflik-konflik sosial yaitu dengan menciptakan warga negara yang berkarakter sesuai dengan ideology bangsa yaitu Ideologi Pancasila. Menurut Zubaedi (2012), orang yang berkarakter adalah sosok berperilaku sesuai dengan kaidah moral. Eksistensi pendidikan moral dan nilai sangat penting di Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang mengakibatkan perpecahan.

Pemerintah sudah semestinya menjamin seluruh generasi muda bangsa memiliki pemahaman tentang Pancasila dan kemampuan dalam mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ketercapaian Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 pada Mata Pelajaran PKn di Papua. Penelitian diharapkan dapat memberi berbagai manfaat dan kontribusi bagi dunia pendidikan khususnya di wilayah terluar negeri provinsi Papua. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan karya ilmiah yang bisa menjadi referensi bagi banyak pihak terkait implementasi kurikulum di Papua khususnya di Kabupaten Merauke. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat bermanfaat kepada para akademisi, guru, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat umum. Hasil penelitian ini bisa menjadi dasar bagi periset dan akademisi untuk melakukan penelitian di bidang pendidikan khususnya terkait pengembangan kurikulum. Hasil dari penelitian ini juga menjadi wawasan baru bagi guru dan mahasiswa tentang perkembangan implementasi kurikulum di Papua khususnya di Kabupaten Merauke.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2014), riset kualitatif merupakan metode untuk

menjelajahi dan memahami makna yang oleh sekumpulan orang dipandang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Kemudian, sehubungan dengan itu, Ary et al.(2010) mengemukakan bahwa riset kualitatif dimaksudkan untuk memahami suatu fenomena dengan menjadikan gambaran keseluruhan sebagai fokus ketimbang memecah-mecahkan gambaran tersebut menjadi beberapa variabel. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau mendeskripsikan ketercapaian implementasi kurikulum 2013 di masa Pandemi Covid-19 di Papua. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis ketercapaian implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran PKn di salah satu Sekolah Menengah Atas di Merauke. SMA ini merupakan salah satu sekolah menengah terbaik dan terfavorit di Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, dan tenaga pendidik yang mengajar Pendidikan Kewarganegaraan serta pegawai tata usaha atau tenaga kependidikan.

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data deskriptif terkait perkembangan dan kemajuan proses implementasi kurikulum selama Pandemi Covid-19. Observasi dilakukan terhadap bukti-bukti proses belajar mengajar selama pandemi. Selain itu, hasil belajar siswa dan capaian pembelajaran turut menjadi objek observasi penelitian ini.

Kemudian, wawancara atau *interview* dilakukan dengan tujuan untuk menghimpin data terkait implementasi kurikulum pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, Guru PKn dan pegawai Tata Usaha. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur dan wawancara sambil lalu. Untuk mendapatkan hasil yang rinci, peneliti melakukan wawancara dengan senyaman mungkin dengan menggunakan bahasa-bahasa wawancara yang sopan, relevan dan tidak



menyinggung. Teknik selanjutnya adalah dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan bagaimana penelitian dilakukan, objek yang diteliti, dan bukti pelaksanaan wawancara dan observasi. Peneliti menjadi alat penelitian yang berfungsi untuk melakukan dokumentasi. Peneliti melakukan pengambilan data secara berulang-ulang (*iteration*) hingga merasa jenuh (*redundancy*) atau hingga dia menganggap jawaban yang diperoleh hampir sama. Hal ini sejalan dengan Lincoln & Guba (1985) yang mengatakan “*The Iteration are repeated as often as necessary until redundancy is achieved.*” Pengumpulan data dikatakan sudah jenuh apabila data yang diperoleh tidak meningkat secara kuantitatif meskipun peneliti sudah menambah jumlah responden penelitian.

Tahap demi tahap prosedur penelitian ini terdiri dari lima tahapan yaitu; 1) tahap penelitian awal (*Preliminary Research*) dilakukan untuk mendiagnosis gejala yang ada di lokasi penelitian. Penelitian awal ini dilakukan dengan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran umum permasalahan yang ada terkait implementasi Kurikulum 2013 di masa Pandemi Covid-19; 2) tahap penyusunan proposal dilakukan setelah mengidentifikasi permasalahan di lapangan dan menentukan topik penelitian yang tepat, 3) tahap pelaksanaan penelitian dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan ijin melaksanakan penelitian dari lembaga terkait.

Dengan adanya persetujuan dari institusi pelaksana penelitian dan instansi tempat penelitian dilaksanakan, maka terdapat suatu kerjasama di bidang penelitian yang dalam hal ini bertujuan untuk mengkaji ketercapaian implementasi Kurikulum 2013; 4) tahap pengolahan data dilakukan setelah mendapatkan data yang merupakan gambaran hasil penelitian dan menyajikannya secara deskriptif setelah mengalami tahapan analisis data; 5) tahap seminar hasil penelitian dilakukan setelah mendapatkan hasil penelitian guna mendapatkan evaluasi tentang

ketercapaian tujuan penelitian.

Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti kemudian mereduksi data yang terkumpul. Data yang dikumpulkan kemudian disajikan dan dianalisis sebagai proses untuk mendapatkan kesimpulan. Seperti yang diutarakan oleh (Sukardi 2021), data kualitatif dikumpulkan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap sumber data. Analisis ini dilakukan pada seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, pengisian angket dan dokumentasi. Terdapat tiga tahap analisis data yang dilalui yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 2 Merauke dengan berfokus pada implementasi kurikulum Mata Pelajaran PKn di masa pandemi. Penelitian dilaksanakan selama dua bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan Nopember 2021. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan guru PKn menjadi responden utama penelitian. Jadi, responden utama terdiri dari empat orang.

1. Implementasi Kurikulum 2013

Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota (Rusman 2009). Implementasi dapat dipahami sebagai upaya atau usaha untuk mengkonversi perencanaan menjadi pelaksanaan. Penelitian terkait ketercapaian implementasi kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran PKn difokuskan pada kelas XI dan kelas XII. Guru PKn menjadi informan terkait implementasi kurikulum pada mata pelajaran yang diampuh di kelas XI dan kelas XII.

Adapun kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut adalah Kurikulum 2013. Muatan kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Muatan Pendidikan Kewarganegaraan Tingkat Pendidikan Menengah (SMA)

Kompetensi	Ruang Lingkup Materi
------------	----------------------



-
- Menganalisis, dan menyajikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
 - Menyajikan bentuk dan kedaulatan negara berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Menunjukkan sikap positif terhadap NKRI dilihat dari konteks geopolitik.
 - Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender.
 - Mengamalkan dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab keseluruhan entitas kehidupan yang berkeadaban.
 - Menunjukkan sikap positif terhadap nilai fundamental, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila.
 - Menganalisis pengelolaan kekuasaan Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Menganalisis strategi yang diterapkan Indonesia dalam menyelesaikan ancaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
 - Menganalisis penyelenggaraan Negara dalam konsep NKRI dan konsep Negara federal.
 - Mengamalkan (dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip, spirit dan tanggung jawab) makna kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang berkeadaban.
 - Dinamika kasus-kasus pelanggaran HAM beserta penanganannya secara adil.
 - Nilai dan moral yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Semangat mengatasi ancaman untuk membangun integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
 - Dinamika Kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai konsep NKRI dan geopolitik Indonesia.
 - Nilai-nilai ideal, instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila.
 - Dinamika pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan negara dan kekuasaan kehakiman.
 - Dinamika pengelolaan dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara serta penanganannya (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme).
 - Strategi yang diterapkan dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
 - Dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep Negara federal.

Sumber: PERMENDIKBUD Nomor 21 Tahun 2016 ([Kemendikbud, 2016](#)).

Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, pada pasal 12 ayat (1), pembelajaran harus diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik ([Kemendikbud, 2021](#)). Jika dibandingkan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Merauke, pembelajaran secara daring kurang memenuhi kriteria yang dituntut oleh pemerintah seperti yang tertuang dalam peraturan tersebut. Dalam wawancara dengan guru PKn, dikatakan bahwa suasana belajar yang interaktif dan menyenangkan tidak dapat terwujud di masa pandemi. Pembelajaran secara daring menjadikan peserta didik cepat bosan dan faktor pendukung yang belum memadai seperti jaringan internet yang stabil juga menjadi penyebab tidak terwujudnya pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.

Sejak tahun 2018, tingkat keberhasilan implementasi kurikulum mengalami penurunan hingga tahun 2021. Penurunan berkisar 5% hingga 8%. Penurunan ini diakibatkan oleh berkurangnya alokasi waktu pembelajaran tatap muka. Fenomena ini sejalan dengan temuan [Giwangsa \(2018\)](#) bahwa penguasaan ranah kognitif pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak cukup untuk menanamkan moral kepada peserta didik. Pengetahuan tersebut membutuhkan penguatan melalui praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam aspek sikap. Jadi, pembelajaran tatap muka secara langsung diperlukan untuk bisa menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri peserta didik sehingga mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

2. Implementasi Kurikulum PKn di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan kehidupan dan mempengaruhi hampir seluruh sektor tidak terkecuali sektor pendidikan. Proses belajar mengajar tidak lagi sepenuhnya dilaksanakan secara langsung atau di luar



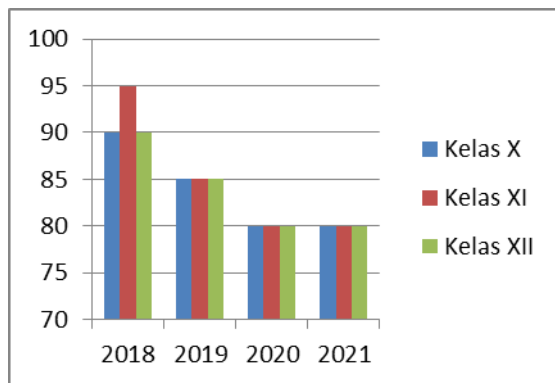
jaringan (luring), tapi dilakukan secara virtual atau dalam jaringan (daring). Dalam menerapkan kurikulum, guru mengalami kesulitan mengingat Mata Pelajaran PKn menekankan penguasaan sikap yang efektif dikembangkan dengan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Berdasarkan wawancara dengan Sukirno tanggal 28 Oktober 2021: *“siswa tidak seluruhnya memiliki perangkat untuk mengikuti pembelajaran secara daring, maka pembelajaran secara daring dan luring terpaksa difasilitasi pihak sekolah”*. Selain terkendala dengan perangkat, terdapat siswa yang mengalami penurunan motivasi belajar. Pihak sekolah sudah mengupayakan dengan melakukan pemanggilan siswa terkait, namun tidak berbuah hasil. Hasil wawancara dengan Andriyati pada tanggal 4 November 2021: *“dari 16 jumlah siswa yang diprogramkan untuk tatap muka (pembelajaran secara luring), hanya 5 hingga 9 orang yang hadir untuk mengikuti pembelajaran”*. Pihak sekolah menyediakan kelas tatap muka secara langsung bagi peserta didik yang tidak memiliki perangkat atau terkendala dalam mengikuti pembelajaran secara daring.

ditemukan selama penyelenggaraan pembelajaran selama pandemi. Pihak satuan pendidikan perlu melakukan evaluasi kurikulum yang sedang diterapkan yaitu Kurikulum 2013. Sudah seharusnya kurikulum darurat dipersiapkan dan diterapkan kemudian di masa-masa darurat, misalnya di masa Pandemi Covid-19.

SIMPULAN DAN SARAN

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan tujuan penguasaan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh peserta didik sesuai dengan jenjangnya. Penguasaan kompetensi dalam Kurikulum 2013 mengedepankan metode-metode pembelajaran yang terdiri atas; pembelajaran kontekstual (*CTL Learning Method*), *Cooperative Learning*, *Inquiry Learning*, dan *Small Group Discussion*. Sebagian besar dari metode tersebut belum cocok digunakan dengan model pembelajaran jarak jauh. Sebagian besar guru dan peserta didik belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan situasi yang baru. *“Selama masa Pandemi Covid-19, guru tidak dituntut lagi untuk mencapai kompetensi dasar, guru hanya diminta untuk mengaar sesuai dengan materi-materi yang ada di dalam kurikulum”* (Wawancara dengan Andriyati 4 November 2021).

Kendala yang pertama adalah penurunan motivasi belajar siswa. Pandemi Covid-19 yang cukup panjang mengakibatkan degradasi sosial peserta didik yang sangat tinggi sehingga mereka terbiasa dengan berbagai hal yang ada di internet seperti media sosial, permainan online, dan hiburan lainnya. Munculnya degradasi tersebut mengubah kebiasaan peserta didik dari interaksi sosial secara tatap muka ke arah interaksi sosial secara daring. Rendahnya motivasi siswa mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak sepenuhnya tercapai. Masalah lain yang muncul adalah infrastruktur pembelajaran jarak jauh yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Terdapat sekelompok peserta didik yang belum memiliki perangkat pembelajaran jarak jauh seperti telepon pintar, jaringan internet, dan daya listrik. Kendala berikutnya adalah literasi digital guru yang belum siap untuk melaksanakan pembelajaran secara



Grafik 1. Persentase Trend Keberhasilan Implementasi Kurikulum (sumber: Hasil Wawancara 4 November)

Pembelajaran di masa pandemi yang dilaksanakan secara daring dianggap kurang efektif. Seluruh responden mengatakan bahwa model dan metode pembelajaran yang diterapkan tidak efektif selama pandemi Covid-19. Mereka juga berpendapat bahwa implementasi Kurikulum 2013 di masa pandemi pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan belum sepenuhnya tercapai. Terdapat banyak kendala yang dihadapi guru maupun peserta didik. Beberapa masalah

daring. Pada awal pembelajaran jarak jauh, pihak sekolah harus memberikan pelatihan terkait pembelajaran jarak jauh secara daring.

DAFTAR PUSTAKA

- Ary, D., Jacobs, L. C., Razavieh, A., & Ary, D. (2010). *Introduction to Research in Education*. 8th. Edition. USA: WARDSWORTH Cengage Learning. [Google Scholar](#)
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design; Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4 ed). California: Sage Publication Inc. <https://us.sagepub.com>
- Depdiknas. (2003). Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Indonesia. [Google Scholar](#)
- Ekawati, F. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMPIT. *Jurnal ISEMA: Islamic Educational Management*, 3(2), 118-139. <https://doi.org/10.15575/isema.v3i2.5006>
- Erinawati, N. R. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Pancasila melalui Pembelajaran Life Skill di Masa Pandemi Covid-19. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 7(1), 7-12. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v7i1.232>
- Fitrah, M. (2017). Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 31-42. <http://dx.doi.org/10.25078/jpm.v3i1.90>
- Giwangsa, S. F. (2018). Pentingnya Pendidikan Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *MADROSATUNA: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 26-40. <https://doi.org/10.47971/mjpgmi.v1i1.16>
- Kemendikbud (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang *Recana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. [Google Scholar](#)
- Kemendikbud. (2012). Dokumen kurikulum 2013. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. [Google Scholar](#)
- Kemendikbud. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. [Google Scholar](#)
- Kemendikbud. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. [Google Scholar](#)
- Laksono, L. B. (2019). "Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, dan Social Imaginary." *Integralistik* 30(2):150-61. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v30i2.20876>
- Luthfiah, L. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Cinta Tanah Air pada Ekstrakurikuler Irmas Al Fikri di SMKN 1 Lemahabang. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(1), 18-27. <https://rivierapublishing.id/JII/index.php/jii/article/view/4>
- Miller, J. P., & Seller, W. (1985). *Curriculum Perspectives and Practice*. Longman Inc., 95 Church Street, White Plains, NY 10601. [Google Scholar](#)
- Mulyasa, E. (2003). *Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. [Google Scholar](#)
- Rowe, A. J. (1989). *Strategic management: A methodological approach*. Addison Wesley publishing company. [Google Scholar](#)
- Rusman, M. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. [Google Scholar](#)
- Salabi, A. S. (2020). Efektivitas Dalam Implementasi Kurikulum



- Sekolah. *Education Achievement: Journal of Science and Research*. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jsr/article/view/177>
- Saputra, G., & Nuryadi, M. H. (2016). Identifikasi Kesulitan Peserta Didik Dalam Menyelesaikan Soal Tes Uraian Obyektif Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Studi Kasus Di SMA Batik 2 Surakarta). *PKn Progresif*, 11(2), 158819. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/progresif/article/view/9732>
- Sukardi, H. M. (2021). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara. [Google Scholar](#)
- Tahir, W. (2017). Pengembangan manajemen sumber daya manusia terhadap peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 6(1), 1-14. <https://doi.org/10.24252/ip.v6i1.3578>
- Wahyudin, D. (2014). *Manajemen Kurikulum*. 1 ed. Bandung: PT. Rosdakarya. [Google Scholar](#)
- Wiratomo, G. H., Suprayogi, S., Kristiono, N., & Isdaryanto, N. (2022). PEMANTAPAN KETAHANAN IDEOLOGI PANCASILA BAGI WARGA NEGARA MUDA MELALUI SEKOLAH POLITIK PANCASILA. *Jurnal Baksooka*, 1(1), 61-70. <https://ejournal.stkippacitan.ac.id/index.php/baksoka/article/view/428>
- Zubaedi, D. P. K. (2011). Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan. *Jakarta: Kencana*. [Google Scholar](#)